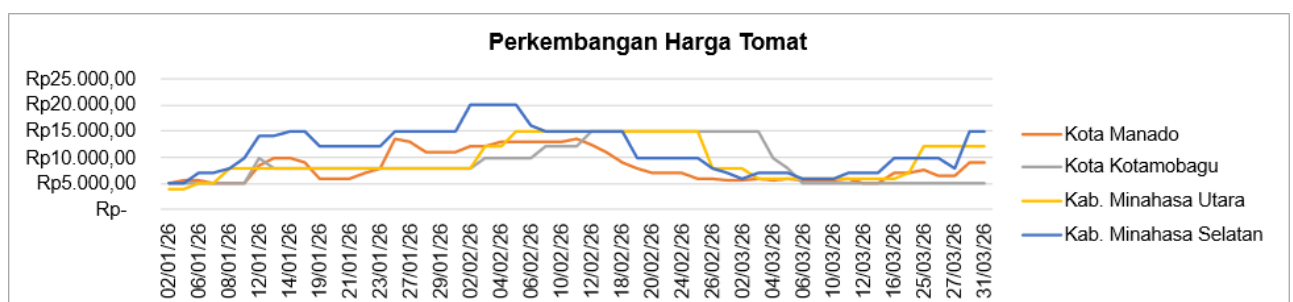
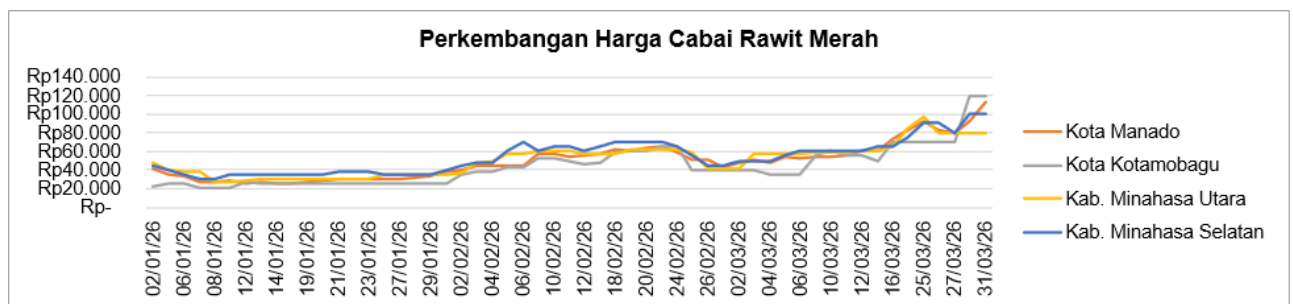


1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

- Pada Triwulan I 2026, tingkat inflasi *m-to-m* sebesar 0,25% dan tingkat inflasi *y-to-d* sebesar 1,95% sedangkan inflasi *y-o-y* sebesar 2,20%. Berdasarkan empat kabupaten/kota pencatatan IHK, tiga di antaranya mengalami inflasi yaitu Kota Manado tercatat sebesar 0,32% (*mtm*) atau 3,38% (*yoy*), Kota Kotamobagu sebesar 0,72% (*mtm*) atau 2,19% (*yoy*) dan Kabupaten Minahasa Selatan tercatat sebesar 0,41% (*mtm*) atau 0,69 (*yoy*) sedangkan Kabupaten Minahasa Utara tercatat mengalami deflasi -0,35% (*mtm*) atau -0,31% (*yoy*).
- Secara tahun ke tahun, komoditas yang memberikan andil/sumbangan inflasi pada triwulan I antara lain tarif listrik (0,83%), emas perhiasan (0,71%), beras (0,36%), daun bawang (0,35%) dan ikan malalugis (0,19%. Sedangkan komoditas yang memberikan sumbangan deflasi antara lain: tomat (-0,59%), daging babi (-0,58%), cabai rawit (-0,51%), bawang putih (-0,10%) dan cabai merah (-0,05%).
- Sementara itu, komoditas yang memberikan andil/sumbangan inflasi *m-to-m* antara lain cabai rawit (0,18%), angkutan udara (0,08%), bawang merah (0,07%), ikan cakalang/ikan sisik (0,05%) dan ikan malalugis/ikan sorihi (0,04%). Sedangkan komoditas yang memberikan andil deflasi antara lain tomat (-0,31%), daun bawang (-0,08%), mobil (-0,03%), tissu (-0,02%) dan emas perhiasan (-0,02%).



2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Setelah mengalami penurunan pada bulan Januari, harga cabai rawit mulai naik pada awal Februari dan berlanjut hingga Maret. Kenaikan harga cabai rawit disebabkan penurunan aktivitas panen selama bulan Ramadhan, curah hujan tinggi di daerah pemasok, serta meningkatnya permintaan dari luar daerah seperti Ternate ke pusat produksi lokal di Modinding, Kotamobagu, dan Bolaang Mongondow Selatan. Ini berdampak pada meningkatnya harga dari supplier. Hal serupa juga dialami oleh komoditas bawang merah.

Bulan Maret terjadi peningkatan lalu lintas angkutan udara di Sulawesi Utara sehubungan dengan libur Lebaran. Sepanjang Maret, 541 pesawat datang dan 536 berangkat melalui Bandara Sam Ratulangi, mengangkut sejumlah 65.456 penumpang untuk kedatangan domestik dan 72.185 penumpang untuk keberangkatan atau meningkat dibanding dengan Februari masing-masing 56.735 dan 53.864 penumpang. Harga avtur sendiri mengalami kenaikan dari sebelumnya Rp. 14.992,11 pada bulan Februari menjadi Rp. 15.537,48 pada bulan Maret. Meningkatnya permintaan dan kenaikan harga bahan bakar menyebabkan kenaikan harga tiket pesawat.

Untuk kenaikan harga ikan cakalang/ikan sisik dan ikan malalugis/ikan sorihi disebabkan cuaca buruk di perairan Sulawesi Utara sehingga nelayan enggan melaut yang mengakibatkan pasokan di pasar berkurang.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Sepanjang triwulan I 2026 TPID Provinsi Sulawesi Utara telah melaksanakan berbagai upaya pengendalian inflasi. Pada bulan Februari, telah dilaksanakan High Level Meeting TPID Provinsi Sulawesi Utara. Acara tersebut dipimpin langsung oleh Gubernur yang menyampaikan 9 arahan strategis dalam mengendalikan inflasi yaitu:

- Memperkuat ketahanan pangan daerah;
- Memperkuat stabilisasi pasokan pada periode HBKN;
- Memperkuat distribusi dan logistik pangan;
- Memanfaatkan instrumen fiskal daerah secara optimal;
- Mengintensifkan gerakan pangan murah dan operasi pasar;
- Memperkuat kerja sama antar daerah dalam menjaga stabilitas pasokan beras, cabai dan bawang merah;
- Mendorong pemberdayaan tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan;
- Memperkuat *early warning* inflasi berbasis data dan dashboard harian; dan
- Memperkuat kolaborasi multipihak.

Sebagai tindak lanjut 9 arahan di atas, Rancangan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Rerusahaan dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan BTT dalam rangka pengendalian sudah mulai dibahas.

Selain itu, sepanjang bulan Ramadhan dan menjelang Idul Fitri, TPID Provinsi Sulawesi Utara telah melaksanakan Gerakan Pangan Murah di berbagai Lokasi serta mengajukan permohonan *extra dropping* LPG Tabung 3 kg ke SAM PT. Pertamina Patra Niaga Sulutgo.

Upaya lainnya yang dilakukan adalah penyusunan anggaran tematik pengendalian inflasi.

Berikut adalah rangkuman upaya pengendalian inflasi selama Triwulan I.

Upaya pengendalian inflasi Januari 2026

- Gubernur Sulawesi Utara memimpin Gerakan Tanam Padi di hamparan lahan Kelompok Tani Maju Bersama Desa Solog Kecamatan Lolak, 23 Januari 2025;
- Monitoring harga pasar harian oleh TPID melalui Dinas Ketahanan Pangan Daerah Prov. Sulut;
- Komunikasi efektif TPID melalui Biro Perekonomian Setda Prov. Sulut dengan

koordinator pedagang perantara Pasar Bersehati Manado;

- Satu data pemantauan harga harian 15 Kabupaten/Kota.

Upaya pengendalian inflasi Februari 2026

- Capacity Building Tim Pengandali Inflasi Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara Tentang Penyusunan Laporan TPID Award 2025 di Jakarta, 18-20 Februari 2026;
- High Level Meeting TPID, TP2DD, TP2ED, TPAKD dan KDEKS Provinsi dan Kabupten/Kota Se-Sulawesi Utara. Di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Prov. Sulut Manado, 23 Februari 2026;
- TPID Provinsi Sulawesi Utara bekerjasama dengan TPID Kota Bitung dalam rangka Ramadhan 2026 melaksanakan Gerakan Pangan Murah (GPM) yang dipimpin Gubernur Sulawesi Utara, 25 Februari 2026;
- Monitoring Tim Saber (Sampu Bersih Pelanggaran Harga, Mutu & Keamanan Pangan Sulut) di Bulan Februari 2026
- Monitoring harga pasar harian oleh Dinas Pangan Daerah Prov. Sulut;
- Komunikasi efektif Biro Perekonomian Setda Prov. Sulut bersama koordinator pedagang perantara Pasar Bersehati Manado;
- Permohonan extra dropping LPG tabung 3 kg selama HBKN Ramadhan dan Idul Fitri;
- Rapat Koordinasi Mingguan TPID Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara;
- Satu data pemantauan harga harian 15 Kabupaten/Kota.

Upaya pengendalian inflasi Maret 2026

- Gerakan Pangan Murah (GPM) yang dipimpin Gubernur Sulawesi Utara, 4 - 19 Maret 2026.
- Monitoring Tim Saber (Sampu Bersih Pelanggaran Harga, Mutu & Keamanan Pangan Sulut), 10 Maret 2026
- Monitoring harga pasar harian oleh Dinas Pangan Daerah Prov. Sulut;
- Komunikasi efektif Biro Perekonomian Setda Prov. Sulut bersama koordinator pedagang perantara Pasar Bersehati Manado;
- Satu data pemantauan harga harian 15 Kabupaten/Kota.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Secara umum, pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di Provinsi Sulawesi Utara pada Triwulan I Tahun 2026 berjalan cukup efektif, tercermin dari inflasi y-o-y yang tetap terkendali sebesar 2,20%. Upaya TPID melalui penguatan koordinasi, stabilisasi pasokan, Gerakan Menanam Padi serta Gerakan Pangan Murah (GPM) yang dipimpin langsung oleh Gubernur mampu meredam tekanan inflasi, khususnya pada periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).

Pelaksanaan *High Level Meeting* (HLM) TPID menjadi langkah strategis dalam memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan. Arahan Gubernur telah ditindaklanjuti melalui berbagai program seperti penguatan ketahanan pangan, intensifikasi operasi pasar, serta penyusunan regulasi pendukung. Selain itu, monitoring harga harian dan komunikasi efektif dengan pelaku pasar turut meningkatkan kewaspadaan dini terhadap potensi gejolak harga.

Namun demikian, pengendalian inflasi masih menghadapi tantangan, terutama pada komoditas hortikultura seperti cabai rawit dan bawang merah yang dipengaruhi faktor cuaca,

musim, dan distribusi. Kenaikan tarif angkutan udara akibat peningkatan permintaan dan harga avtur juga menunjukkan bahwa komponen *administered prices* masih memberikan tekanan inflasi.

Di sisi lain, pelaksanaan HLM yang belum merata di seluruh kabupaten/kota menyebabkan efektivitas koordinasi dan implementasi kebijakan belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pada aspek ketahanan pasokan, pemerataan pelaksanaan koordinasi TPID, serta peningkatan intervensi pada komoditas strategis agar pengendalian inflasi ke depan semakin efektif.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

- Melakukan pemantauan secara berkala terhadap harga komoditas strategis seperti cabai rawit, bawang merah, dan tomat yang berpotensi mengalami fluktuasi. Apabila diperlukan, intervensi dapat dilakukan melalui Gerakan Pangan Murah (GPM) dengan menerapkan prinsip 4T (tepat lokasi, tepat sasaran, tepat komoditas, dan tepat waktu) guna menjaga stabilitas harga serta memberikan sinyal kecukupan pasokan. Selain itu, optimalisasi peran kios TPID di pasar perlu ditingkatkan dalam rangka penerapan Harga Acuan Penjualan (HAP) dan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk komoditas pangan strategis.
- Melaksanakan inspeksi mendadak (sidak) di pasar tradisional maupun modern dengan berkoordinasi bersama Satuan Tugas Sapu Bersih Pelanggaran Harga, Keamanan, dan Mutu Pangan (Satgas Saber Pangan) untuk mengawasi adanya ketidakwajaran harga, gangguan distribusi, serta potensi penimbunan bahan pokok.
- Mengidentifikasi wilayah penyangga komoditas berdasarkan Neraca Pangan Nasional sebagai dasar untuk mendorong pelaksanaan Kerja Sama Antar Daerah (KAD), khususnya dalam mendistribusikan pasokan dari daerah yang mengalami surplus ke daerah yang mengalami defisit.
- Seiring meningkatnya ketegangan geopolitik global yang berpotensi mendorong kenaikan harga minyak dunia serta mengganggu rantai pasok, diperlukan langkah mitigasi melalui koordinasi intensif dengan Pertamina guna memastikan ketersediaan kuota BBM yang mencukupi kebutuhan masyarakat dan operasional di Sulawesi Utara secara berkelanjutan. Selain itu, pengawasan distribusi BBM subsidi juga perlu diperkuat agar tepat sasaran serta mencegah praktik penimbunan.
- Memperkuat komunikasi kebijakan kepada masyarakat melalui imbauan belanja bijak dan gerakan pengurangan pemborosan pangan, guna menjaga ekspektasi inflasi tetap terkendali serta mencegah perilaku konsumtif berlebihan yang dapat memicu tekanan harga.